

BPK Temukan 26 Kasus Asset Pemprov

PONTIANAK. BPK RI Perwakilan Kalbar telah selesai melakukan pemeriksaan manajemen asset Pemerintah Provinsi Kalbar. Hasilnya, terdapat 26 temuan pemeriksaan ditinjau dari aspek perolehan, aspek penggunaan dan pemanfaatan, aspek pengamanan dan pemeliharaan, maupun aspek penghapusan dan pemindahtanganan.

Penyerahan hasil pemer-

iksaan atas manajemen aset itu dilakukan anggota BPK RI, Dr H Rizal Djalil kepada Ketua DPRD Kalbar, Minsin SH dan Gubernur Kalbar dalam rapat paripurna di Balairungsari DPRD Kalbar, Kamis (3/11).

"Kita telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, fokus kepada aset. Satu-satunya daerah di seluruh Indonesia yang kita lakukan pemeriksaan

seperti ini hanya disini (Kalbar)," ungkap anggota BPK RI, Dr H Rizal Djalil kepada wartawan usai paripurna, Kamis (3/11).

Dia mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, sudah sangat lengkap dan jelas seluruh asset pemerintah provinsi Kalbar. "Saya katakan ada beberapa aset yang dikuasai beberapa masyarakat, ditanggapi oleh masyarakat.

Saya serahkan sepenuhnya kepada gubernur bersama dengan DPRD," jelas Rizal Djalil.

Menurut dia, kalau misalnya masyarakat mau mengganti rugi, mengurus segala macam, maka serahkan sepenuhnya. "Yang jelas kita di BPK sudah tahu aset penda nilainya sekian dan posisinya dimana," tanya dia.

■ Halaman 7

Temuan asset Pemprov Kalbar

Belum dapat diukur nilainya

- Perjanjian kerjasama Pemprov Kalbar-PT CPM dalam pemanfaatan lahan eks tanah hak pakai KONI Jalan Ahmad Yani, Parit Tokaya, Pontianak Selatan.
- Dalam mitra kerjasama Bangun Guna Serah BOT dengan PT NSI, Restoran SB, dan Rumah Makan AU, Pemprov Kalbar belum mengenakan retribusi kekayaan daerah.

Masalah menonjol

- Barang milik Pemprov senilai Rp 1.952.699.800 tidak diketahui keberadaannya.
- Aset-aset yang diperoleh dari hibah/bantuan pemerintah pusat tidak jelas statusnya senilai Rp 3.846.864.400.
- Penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik pemprov tidak sesuai ketentuan senilai Rp 2.899.074.000.
- Tanah milik Pemprov Kalbar dikuasai pihak ketiga senilai Rp 917.882.590,92.
- Pengamanan tanah milik Pemprov Kalbar belum optimal (belum bersertifikat) senilai Rp 79.901.908.389,33.

Sumber: BPK RI Perwakilan Kalbar

Meski demikian, dirinya juga meminta kepada DPRD agar memperlancar proses mengenai tanah milik Pemprov yang dikuasai masyarakat. "Kalau ada yang mau dihibahkan kepada masyarakat ya sudah, DPRD nya bicara dengan pemda, terkait dengan enam hektar tadi. Saya juga minta kepada Kepala BPKP tidak hanya berdiam diri, ikut membantu pemda, jangan melihat pemda seperti obyek pemeriksaan saja," kata Rizal Djilil.

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi untuk melakukan penataan aset ini, sampai pada pemeriksaan BPK, yang pada akhirnya sudah tercatat dengan baik merupakan catatan sejarah Kalbar.

"Untuk mencatat harta kekayaan kita, saya berterima kasih kepada BPK, kepada DPRD yang telah memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mencatat harta kekayaannya," tegas Cornelis.

Selanjutnya, kata dia, ada yang ditindaklanjuti, menyangkut anggaran kalau misalnya suratnya (sertifikat) belum ada dan itu harus kita buat. Demikian juga yang dipakai rakyat, kita juga mau tanyakan kepada rakyat, mau apa ini mau pergi apa mau ganti. "Hasil itu nantinya akan kita serahkan kepada Dewan," ujar dia.

Pemeriksaan atas pengelolaan BMD/aset tetap pada pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2010 dan 2011 (semester I) itu merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Bertujuan menilai penyajian informasi keuangan terkait pengelolaan barang milik daerah dan kesesuaian pengelolaan aset dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Selain melakukan pengujian pada sistem pengendalian intern yang mencakup

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian, BPK juga mengungkapkan 26 temuan pemeriksaan ditinjau dari aspek perolehan, aspek penggunaan dan pemanfaatan, aspek pengamanan dan pemeliharaan, maupun aspek penghapusan dan pemindahtanganan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, ada temuan yang nilainya belum dapat diukur karena bersifat potensi penerimaan daerah. Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan pemprov Kalbar.

Diantaranya perjanjian kerjasama pemprov dengan PT CPM terkait pemanfaatan lahan eks tanah hak pakai KONI jalan Ahmad Yani, Parit Tokaya, Pontianak Selatan. Belum mengatur besaran kontribusi yang harus diberikan PT CPM, dan tim pengkaji tidak melakukan penelitian dan penilaian atas biaya clean and clear tanah yang dikerjasamakan dengan PT CPM.

Riwayat tanah tersebut berasal dari tanah milik adat, tanah milik adat dan tanah negara yang diperoleh Pemprov pada tahun 1973 dan peralihan yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Kemudian, ada beberapa mitra kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) belum dikenakan retribusi pemaknaan kekayaan daerah. Dalam mitra kerjasama Bangun Guna Serah BOT dengan PT NSI, Restoran SB, dan Rumah Makan AU, Pemprov Kalbar belum mengenakan retribusi kekayaan daerah.

Permasalahan menonjol lainnya yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Kalbar terkait penatausahaan barang daerah menurut BPK sebenarnya merupakan permasalahan yang telah lama terjadi, namun hingga saat ini penyelesaiannya berlarut-larut.

Permasalahan itu menyangkut barang milik daerah Pemprov minimal senilai Rp 1.952.699.800 tidak diketahui keberadaannya.

Aset berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp1.541.854.550, Dinas Pendidikan minimal senilai Rp 409.945.250 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp 900.000 tidak diketahui keberadaannya.

Selanjutnya, aset-aset yang diperoleh dari hibah/bantuan pemerintah pusat tidak jelas statusnya senilai Rp 3.846.864.400, aset peralatan dan mesin pada enam SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar tidak jelas statusnya karena dokumen pendukung aset hibah tidak ada sehingga status aset belum jelas, belum nyata dan belum sah menjadi milik Pemprov.

Kemudian, penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik pemprov tidak sesuai ketentuan senilai Rp 2.899.074.000 di antaranya mengenai permasalahan aset peralatan dan mesin yang masih dikuasai mantan Ketua/anggota DPRD, mantan gubernur dan mantan PNS di lingkungan pemprov Kalbar, serta aset peralatan dan mesin di rumah jabatan Ketua DPRD yang dikuasai pihak lain, serta persoalan aset bangunan dan gedung pada rumah dinas jabatan DPRD yang ditempati oleh bukan penghuni yang sah dan diantaranya disewakan tanpa persetujuan gubernur.

Selain itu, tanah milik pemprov Kalbar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 917.882.590,92. Enam bidang tanah milik Pemprov seluas 155.124 Meter per segi yang tersebar di Pontianak, Singkawang, dan Bengkayang telah dikuasai oleh pihak ketiga.

Terakhir pengamanan tanah milik pemprov Kalbar belum optimal (belum bersertifikat) senilai Rp 79.901.908.389,33. Dari 893 bidang tanah yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2010, hanya sebanyak 290 bidang tanah yang bersertifikat. Diantara 290 bidang tanah yang bersertifikat tersebut, sebanyak 144 bidang tanah dengan luas total 2.803.989 meter per segi masih bersertifikat tidak atas nama pemprov. (jul)